

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Menurut Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Halim (2004:67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pendapatan asli daerah adalah merupakan sumber penerimaan daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Menurut undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 6 pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Siagian, dalam bukunya mengenai Pajak Daerah Sebagai Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan pajak negara yang diberikan kepada daerah dan disetujui sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam desentralisasi fiskal, pungutan pajak daerah adalah tidak berarti memberikan sumber fiskal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah dan nasional, melainkan melalui

penelaahan beberapa faktor dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Maksimisasi Pendapatan Asli Daerah akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah dua komponen tersebut. Berdasarkan definisi pajak yang dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri-ciri pajak yaitu:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan aturan undang-undang dan aturan pelaksanaan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang mana jika dari pemasukannya masih terdapat surplus maka digunakan untuk investasi di sektor publik. Tujuan yang utama dari pemungutannya adalah sebagai sumber keuangan negara maupun sebagai sumber keuangan daerah.
- 4) Pajak dipungut disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Jenis pajak provinsi ditetapkan sebagai empat jenis pajak, namun walaupun demikian propinsi boleh tidak memungut salah satu

atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di suatu daerah dipandang kurang memadai. Jenis pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 yaitu:

- 1) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan keramaian yang ditonton atau dinikmati oleh banyak orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- 4) Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame dapat didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak jenisnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, yaitu dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang,

jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum pada suatu tempat kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- 5) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan jika di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang tagihannya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c, yaitu pajak atas pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah adalah salah satu dari pendapatan asli daerah yang dipercaya mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Rohmat Soemitro, dalam Adrian (2008:55)).

Menurut Rohmat Soemitro, dalam Adrian (2008:74), menjelaskan retribusi daerah merupakan sesuatu yang dibayarkan kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah adalah sesuatu yang dibayarkan atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat erat hubungannya dengan jasa dari layanan yang pemerintah daerah berikan kepada yang membutuhkan.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian dari retribusi daerah, yang kemudian disebut sebagai retribusi, yaitu pungutan yang dilakukan oleh daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari penjelasan mengenai

pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho (1987: 43) dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan pemerintah daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan pendapatan

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga salah satu pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Hak penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa/Giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai sebab dari penjualan, pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Dalam UU No.10 tentang kepariwisataan, kepariwisataan yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan seseorang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan disebut sebagai wisatawan (*tourist*).

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bersifat sementara untuk mencari keseimbangan, kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1987 dikutip oleh Riska Arlina, 2013).

Menurut Prof. Hunziker dan Kraft (1942), pariwisata merupakan keseluruhan hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang timbul dari adanya perjalanannya dimana perjalanan tidak bersifat menetap dan bukan untuk mencari nafkah.

Menurut Ramdhani (2015), pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya permintaan wisatawan yang berupa barang dan jasa. Untuk mengukur pengaruh pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah dapat dilakukan dilakukan melalui pendekatan pengeluaran pemerintah (*tourist expenditure*) dan pendekatan permintaan wisatawan (*tourist demand*) terhadap barang dan jasa. Pengeluaran wisata dapat berupa akomodasi, konsumsi makan, angkutan wisata atau jasa-jasa lainnya. Pariwisata sebagai suatu sistem yang mempunyai tatanan jaringan proses pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan teknologi serta kegiatan yang saling mempengaruhi untuk menarik dan memfasilitasi wisatawan. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh

pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan industri pariwisata antara lain :

1) Membuka Kesempatan Kerja

Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

2) Menambah Pendapatan Masyarakat Daerah

Di daerah pariwisata tersebut masyarakat dapat menambah pendapatan dengan menjual barang dan jasa.

3) Menambah Devisa Negara

Dengan semakin banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, maka akan semakin banyak devisa yang diterima.

b. Jenis-jenis Pariwisata

Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, menurut James J, Spillane (1987 : 28-31) dapat juga dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut :

1) Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

2) Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata untuk rekreasi dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.

3) Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

4) Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

5) Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6) Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

3. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau bergantung dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha guna mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Inovasi-inovasi baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan satu dari sumber penerimaan daerah yang diharapkan selalu mengalami peningkatan. Adapun keuntungan yang diberikan sektor pariwisata adalah sebagai berikut menurut Spillane (1987) :

- a. Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut
- b. Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari sisi peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, berupa penginapan, restoran, rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi

daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat meningkat

- c. Menambah devisa negara
- d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli
- e. Menunjang gerak pembangunan daerah, di daerah pariwisata timbul pembangunan jalan, hotel, restoran dan lain-lain sehingga pembangunan di daerah tersebut lebih maju.

4. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Menurut Soekadijo (2001) jumlah wisatawan adalah sejumlah orang yang mengadakan perjalanan dan pergi kesuatu tempat yang akan didatanginya tanpa menetap di tempat tersebut, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Sedangkan mereka yang dianggap sebagai wisatawan adalah orang yang melakukan kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya : orang yang melakukan perjalanan untuk pertemuan-pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan (Foster, 1999).

Secara teoritis dalam Ida Austriana (2005) dijelaskan semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pengeluaran yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

Menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut jumlah wisatawan hasil dari total keseluruhan orang yang bukan penduduk asli yang datang untuk melakukan perjalanan pendek. Adapun menurut Krapf and Hunziker (1996), seorang pakar pariwisata meyakini bahwa jumlah wisatawan adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh sejumlah orang yang bukan penduduk asli dengan alasan untuk mencari kesenangan. Berdasarkan seluruh definisinya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan adalah total keseluruhan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung atau datang kesuatu tempat yang bukan daerah tempat tinggalnya dengan tujuan untuk berlibur.

Ada beberapa manfaat jika banyak wisatawan mengunjungi suatu tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang disetorkan kepada daerah setempat. Dalam bukunya Nawawi mengutip pernyataan dari Ramdani yang pada intinya berisi mengenai pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Salah satu pengaruh ekonomi dalam kegiatan pariwisata di suatu daerah terletak pada *purchasing power* yang

diperoleh masyarakat di daerah penerima wisatawan melalui pengeluaran dari wisatawan yang cenderung membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dilakukan wisatawan tersebut di daerah asalnya. Selanjutnya pengeluaran wisatawan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Nawawi,2003).

Menurut Ida Austriana (2005), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan menambah jumlah pendapatan dari sektor pariwisata, semakin besar jumlah wisatawan maka pendapatan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus meningkat.

5. Jumlah Obyek Wisata

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu provinsi yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai

kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya kepada wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara (Nasrul,2010).

Menurut Mursid (2003), obyek wisata merupakan daerah atau kawasan yang menjadi tujuan pariwisata yang didalamnya terdapat keindahan dan keunikan yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata. Untuk memberikan kepuasan yang tinggi terhadap wisatawan, maka obyek wisata harus dirancang dan dibangun secara profesional berdasarkan potensi daerah wisata tersebut.

Obyek wisata umumnya berdasarkan pada :

- a. Terdapat sumber daya yang mampu menimbulkan rasa senang, nyaman, indah dan bersih.
- b. Terdapat aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Terdapat ciri khusus yang bersifat langka/unik.
- d. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam yang dimiliki seperti pantai, pegunungan, hutan dan sebagainya.

- e. Obyek wisata budaya memiliki daya tarik tinggi karena terdapat nilai khusus yang mampu memberikan pengetahuan mengenai budaya pada masing-masing daerah seperti upacara adat, dan kesenian daerah.

Menurut Cooper yang dikutip oleh I Nyoman Widiarta (2016), untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan terhadap wisatawan, daerah tujuan wisata harus didukung oleh empat komponen utama atau yang biasa dikenal dengan istilah 4A, yaitu :

- a. *Atraksi/attraction,*
- b. *Akesebilitas/accessibility,*
- c. *Fasilitas/amenities,* dan
- d. *Organisasi kepariwisataan/ancillary*

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari nilai tambah dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah (total nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah pada periode waktu tertentu dalam (satu tahun)). Untuk menghitung total

nilai produksi yang dihasilkan dari suatu kegiatan perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan dengan tiga cara perhitungan. Ketiga cara perhitungan tersebut melalui cara produksi, cara pengeluaran dan cara pendapatan (Sukirno, 1994).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat bergantung terhadap potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Terdapatnya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bervariasi pada setiap daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibagi menjadi beberapa macam pendekatan perhitungan diantaranya adalah :

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai total produksi (output) tiap-tiap sektor.

b. Pendekatan Pengeluaran (*Pengeluaran/Expenditure Approach*)

PDRB diperoleh dari penjumlahan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran dapat menggunakan rumus :

$$\text{PDRB} = C + I + G + (E - \text{Im})$$

Keterangan:

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = Investasi (pembentukan modal)

G = Pengeluaran konsumsi pemerintah

E-Im = Eskpor neto (ekspor dikurangi impor)

c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB diperoleh dari hasil penjumlahan semua komponen permintaan akhir. PDRB dihitung sebagai jumlah atas balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Balas jasa tersebut terdiri dari :

- 1) Upah dan gaji, balas jasa atas tenaga kerja
- 2) Sewa tanah, balas jasa tanah
- 3) Bunga modal, sebagai balas jasa modal
- 4) Keuntungan, sebagai balas jasa keterampilan.

7. Jumlah Hotel

Menurut Dinas Pariwisata, hotel merupakan usaha yang memanfaatkan fungsi bangunan atau dengan sebagiannya khusus

disediakan, dimana setiap orang yang berkunjung mendapatkan pelayanan menginap dan makan serta menikmati segala fasilitas dengan bayaran. Akhir-akhir ini perkembangan pembangunan hotel baru atau pengadaan kamar-kamar hotel sangat pesat mulai dari hotel berbintang dan tidak berbintang jumlahnya cenderung bertambah setiap tahunnya. Fungsi hotel tidak hanya untuk menginap tetapi bisa digunakan sebagai sarana pertemuan baik itu untuk kepentingan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk singgah beristirahat. Bisnis hotel memiliki peran besar dalam pembangunan daerah, pengembangan hotel harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mampu membuka lapangan kerja. Hotel adalah jenis usaha yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dan juga wisatawan, dan juga retribusi pajak dari hotel akan memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan daerah.

Adapun Jenis-jenis hotel adalah sebagai berikut:

a. *City Hotel*

Hotel yang berlokasi di pekotaan, biasanya di peruntukkan bagi masyarakat yang hanya tinggal sementara atau dalam jangka waktu pendek. *City Hotel* juga disebut sebagai transit hotel karena biasanya ditempati oleh orang-orang yang melakukan

kegiatan bisnis dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. *Residential Hotel*

Residential hotel yaitu hotel yang berlokasi didaerah pinggiran kota besar dan jauh dari keramaian kota, tetapi mudah dalam mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama.

c. *Resort Hotel*

Resort hotel yaitu hotel yang berlokasi didaerah pegunungan atau tepi pantai, tepi danau, atau tepi aliran sungai. Hotel ini biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin beristirahat pada waktu libur atau bagi masyarakat yang ingin berekreasi.

d. *Motel (Motor Hotel)*

Motel yaitu hotel yang berlokasi di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya. Hotel ini diperuntukkan bagi masyarakat sebagai tempat istirahat sementara dalam melakukan perjalanan yang dalam perjalannya menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

Menurut (Tarmoezi, 2000) jumlah hotel dapat dibedakan menjadi:

a. *Small Hotel*

Kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.

b. *Medium Hotel*

Jumlah yang disediakan berjumlah antara 28-299 kamar.

c. *Large Hotel*

Jumlah kamar yang disediakan lebih dari 300 kamar.

8. Hubungan Antar Variabel

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta :

a. Hubungan antara Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan

memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha diindustri pariwisata dari pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisatawan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri pariwisata.

Jumlah wisatawan merupakan seberapa banyak wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke suatu negara atau daerah dalam satu periode. Jika jumlah pengunjung wisatawan dapat meningkat setiap tahunnya di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat mempengaruhi angka jumlah Pendapatan Asli Sektor Pariwisata.

- b. Hubungan antara Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Obyek wisata merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik terhadap masyarakat. Semakin banyak jumlah obyek wisata maka seharusnya akan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap pendapatan sektor pariwisata yang akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- c. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Hubungan yang jelas antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan hubungan fungsional karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat maka akan mengakibatkan penerimaan pemerintah daerah bertambah yaitu digunakan untuk membiayai program-program pembangunan diberbagai jenis infrastruktur. Kemudian akan memajukan peningkatan layanan yang diberikan oleh pemerintah wilayah daerah diperuntukkan bagi masyarakat yang di harapkan dapat memberikan peningkatan atas produktifitasnya (Santoso dan rahayu (2005)).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak daerah. Dengan begitu akan ada kenaikan pendapatan pemerintah yang akan meningkatkan fasilitas pemerintah terhadap penduduk sehingga meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian akan

menaikan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi setiap tahun masyarakat, maka dapat meningkatkan kesanggupan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Ema, 2013).

d. Hubungan antara Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Hotel merupakan fasilitas yang tidak hanya memiliki fungsi untuk menginap tetapi juga memiliki fungsi lain seperti tempat pertemuan untuk melakukan kegiatan bisnis, seminar ataupun hanya untuk beristirahat. Pembangunan Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa terlepas dari kebutuhan dan ciri khas para wisatawan tetapi harus memperhatikan segala aspek sehingga pengelolaan dan pemanfaatan dari pembangunan hotel dapat dimaksimalkan. Sehingga mampu menarik jumlah wisatawan untuk menginap dan akan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Novitri (2014) bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Jambi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Provinsi Jambi. Adapun metode analisis yang digunakan pada

penelitian ini adalah regresi data panel dengan spesifikasi penerimaan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang dipengaruhi oleh jumlah kamar hotel, PDRB sektor pariwisata, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap, dan jumlah wisatawan. Hasil dari penelitian ini yaitu perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi dari tahun 2000-2012 mulai membaik. Namun peran pemerintah dalam memperhatikan pariwisata di Provinsi Jambi sangat kurang. Selanjutnya, secara parsial jumlah kamar hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata, hal ini disebabkan peningkatan jumlah kamar penginapan tidak didasarkan atas meningkatnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa penginapan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shella (2014) dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah wisatawan, objek wisata, jumlah hotel, dan lama tinggal wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh dengan nilai R^2 dan R masing-masing sebesar 0,984 dan 0,992. Dari keempat variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh adalah variabel jumlah wisatawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fariantin dan Amri (2017). Penelitian menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai

variabel dependennya sedangkan variabel independennya adalah Jumlah Objek Wisata, Jumlah Pengunjung, dan PDRB (Non Migas-Non Pertanian). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan PDRB (Non Migas-Non Pertanian) berpengaruh terhadap PAD di Lombok Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik, Uji F dan Uji T. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan PDRB (non migas dan non pertanian) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Jumlah objek Wisata jumlah wisatawan dan PDRB (non migas dan non pertanian) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sri Indriyani, dkk (2018). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan secara parsial maka dapat ditarik kesimpulan retribusi objek wisata berpengaruh positif tetapi tidak signifikan sehingga, setiap retribusi objek wisata mengalami peningkatan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2016. Jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga, setiap jumlah wisatawan mengalami

kenaikan atau penurunan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2016. Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan sehingga, jika pajak hiburan mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian dan analisis secara simultan retribusi objek wisata, jumlah wisatawan dan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun tahun 2013 – 2016.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Udayantini (2015) yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata, jumlah wisatawan terhadap pendapatan sektor pariwisata, tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata, dan jumlah wisatawan terhadap tingkat hunian di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Subjek dalam penelitian ini adalah hotel, restoran, dan retribusi pariwisata lainnya, dan objeknya adalah jumlah wisatawan, tingkat hunian, dan pendapatan sektor pariwisata. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan ada pengaruh dari jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata dengan sumbangan pengaruh sebesar 88,3%, yang kedua ada pengaruh positif dari jumlah wisatawan

terhadap pendapatan sektor pariwisata dengan sumbangan pengaruh sebesar 63,5%, yang ketiga ada pengaruh positif dari tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata dengan sumbangan pengaruh sebesar 17,3%, dan, yang keempat ada pengaruh positif dari jumlah wisatawan terhadap tingkat hunian hotel di Kabupaten Buleleng dengan sumbangan pengaruh sebesar 05,1%.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Isnaini (2014) yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependennya dan variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita sebagai variabel independent. Berdasarkan hasil analisis dengan uji regresi linier berganda yang dilakukan maka hasilnya adalah jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung, sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrianti (2016) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisata, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lingga. Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah kunjungan wisata, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel serta pendapatan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lingga periode Tahun

2011 sampai dengan 2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan SPSS versi 21 yang nantinya menggambarkan pengaruh jumlah kunjungan wisata, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan daerah sector pariwisata di Kabupaten Lingga Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan nilai adjusted R-Square sebesar 41,5%. Artinya 41,5% pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas Kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, serta jumlah objek wisata. Sedangkan sisanya 58,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Selanjutnya Suherlan (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi jumlah objek pariwisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar, dan pendapatan perkapita terhadap retribusi objek pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil uji pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar, dan pendapatan per kapita terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukkan beberapa hasil, diantaranya yaitu jumlah hotel dan akomodasi lainnya tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata. Sementara itu, jumlah wisatawan terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata. Sedangkan jumlah obyek wisata tidak terbukti

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata. Sementara itu, Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Hengyun Li (2016). Penelitian ini mencoba untuk melengkapi literatur dengan menyelidiki hubungan teoritis dan empiris antara pengembangan pariwisata dan ketimpangan pendapatan daerah. Dengan menerapkan model konvergensi kondisional ekonomi dan teknik estimasi data panel dinamis, studi ini secara empiris menguji pengaruh dan pentingnya pariwisata dalam mengurangi ketimpangan regional di Tiongkok. Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh total pariwisata pada konvergensi regional, tetapi juga mengeksplorasi jenis pariwisata yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan variabel wisatawan internasional, wisatawan domestik dan investasi. Dan hasil dari penelitian ini variabel wisatawan domestik dapat mempercepat konvergensi perekonomian daerah lebih cepat dari wisatawan internasional. Sedangkan variabel investasi memiliki pengaruh yang bertahap dan peningkatannya tidak monoton terhadap perekonomian daerah.

Kemudian Fateme (2016) juga melakukan penelitian mengenai dampak ekonomi dari industri pariwisata, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian menggunakan variabel jumlah pengunjung, jumlah hotel, lama tinggal, tempat makan dan minum, fasilitas hiburan dan rekreasi.

Faktor permintaan/penawaran mempengaruhi jumlah pengunjung, lama tinggal mereka, dan pola pengeluaran mereka sementara karakteristik struktural ekonomi menentukan kecenderungannya untuk mensirkulasikan kembali pengeluaran tersebut secara internal. Semakin banyak putaran sirkulasi yang dihasilkan dalam perekonomian, semakin besar efek pengganda dari stimulus awal dan akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Wisatawan berkontribusi pada penjualan, laba, pekerjaan, pendapatan pajak, dan pendapatan di suatu daerah. Efek paling langsung terjadi dalam sektor pariwisata utama, restoran, transportasi, hiburan, dan perdagangan ritel. Melalui efek sekunder, pariwisata mempengaruhi sebagian besar sektor ekonomi. Analisis dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata biasanya berfokus pada perubahan penjualan, pendapatan, dan lapangan kerja di suatu wilayah yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata yang akan meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang dan menggunakan kemampuan khusus dan produk pariwisata dari negara-negara berkembang, yang menderita dari beberapa indeks seperti pengangguran, batasan dalam penghasilan dan aliran mata uang, inflasi dan masalah lain, sebagian besar dari mereka masalah ekonomi bisa diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Galina (2016) ini menggunakan analisis input-output (IO) untuk menilai manfaat ekonomi untuk wilayah

tersebut. Manfaat yang berkelanjutan dari proyek-proyek untuk ekonomi regional karena potensi peningkatan kunjungan wisatawan diselidiki. Ekonomi regional akan tumbuh lebih cepat jika koneksi antara sektor terkait pariwisata dan industri utama didorong. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengadaan lokal dapat membantu meningkatkan manfaat dari peningkatan pariwisata ke daerah. Analisis dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari tahap konstruksi proyek telah mengidentifikasi keuntungan besar dan positif bagi ekonomi regional dan negara bagian, perkembangan serupa dapat meningkatkan tingkat pengunjung antara 10% dan 60%. Diramalkan bahwa peningkatan jumlah pengunjung ini akan memberikan tambahan Aven \$ 12 juta untuk Livingstone Shire sehingga akan meningkatkan pendapatan ekonomi regional. Estimasi konservatif untuk \$ 5 yang digunakan di sini untuk menganalisis pengaruh perkembangan pada ekonomi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan yang sama dari setiap industri terkait pariwisata akan menghasilkan peningkatan lapangan kerja yang tidak merata oleh industri.

C. Hipotesis Penelitian

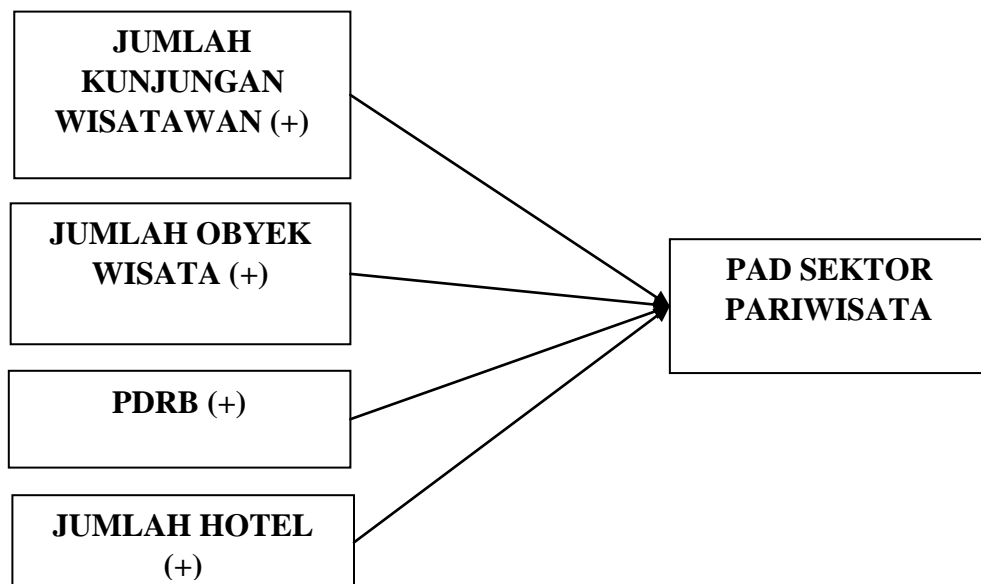
Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh positif antara Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Diduga terdapat pengaruh positif antara Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Diduga terdapat pengaruh positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Diduga terdapat pengaruh positif antara Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dengan hubungan antara variabel-variabel diatas maka dapat dibuat berupa skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Skema Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dengan Variabel yang Mempengaruhinya